



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: IV (empat)
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Maret 2021.
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr.Abdul Fikri Faqih, MM./Wk.Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI2. Laporan Perkembangan/Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 20 Januari 2021 mengenai Skema Kebijakan Afirmatif dan opsi lain terkait GTK Honorer.3. Perkembangan Program 1 Juta PPPK Tahun 20214. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 41 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Nadiem Anwar Makarim - Mendikbud RI2. Prof.Ainun Na'im, Ph.D – Plt.Sekjen Kemendikbud RI3. Dr.Iwan Syahril, Ph.D – Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbud RI4. Prof.Ir.Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI5. Jumeri, S.TP., M.Si. - Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI6. Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Vokasi7. Hilmar Farid, Ph.D. – Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI

8. Totok Suprayitno, Ph.D. – Plt.Ka.Balitbang Perbukuan Kemendikbud RI
9. Chatarina M Girsang, S.H., S.E., M.H. – Irjen Kemendikbud RI
10. Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. – Ka.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.15 WIB oleh **Dr.Abdul Fikri Faqih, MM./Wk.** Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.


1. Komisi X DPR RI menyerahkan Laporan Hasil Panja Peta Jalan Pendidikan kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Peta Jalan Pendidikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR RI pada masa sidang berikutnya.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi antara lain dengan Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk menerbitkan penguatan kebijakan lintas K/L mengenai kepastian penganggaran penggajian GTK PPPK dalam formasi Dana Alokasi Umum APBN TA 2021; sebagai jaminan bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi GTK Honorer dalam PPPK Tahun 2021.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru PPPK terlaksana dalam setiap tahapan seleksi tanpa diskriminasi bagi guru honorer yang mengikuti seleksi guru PPPK.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi dalam seleksi guru PPPK merupakan langkah awal sebagai upaya menyusun kebijakan makro-strategis mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer yang didasari pada data pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi Tenaga Kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi PPPK tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan, seperti *input* dan *update* Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah secara masif dan komprehensif, khususnya dalam hal kebijakan perhitungan dana BOS berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah; sehingga terjadi pemahaman yang sama terhadap Permendikbud No.15 Tahun 2021 tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 dan Permendikbud No.16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana BOS Reguler Masing-Masing Daerah.
7. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami secara baik dan tepat oleh masyarakat, seperti terkait tidak adanya kata 'agama' dalam Peta Jalan Pendidikan.
8. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap: (i) pertanyaan dan catatan anggota serta (ii) jumlah Guru Honorer yang ikut seleksi PPPK per daerah (provinsi/kabupaten/kota), paling lambat tanggal 24 Maret 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.25 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM.